

Pendidikan Tinggi Mampu Membangun Ekonomi

JAKARTA (KR) - Pendidikan tinggi memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Termasuk, pembangunan ekonomi. "Kami ingin memastikan, kementerian kami mampu menjadikan pendidikan tinggi sebagai bagian pembangunan ekonomi," kata Mendiknas Satryo Soemantri Brojonegoro dalam acara Taklimat Media Arah dan Kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta, Jumat, (3/1).

Oleh karena itu, menginginkan pendidikan tinggi mampu memberikan dampak lebih baik kepada masyarakat dan berdampak pada pembangunan nasional. "Ada beberapa target pembangunan ekonomi yang ingin kita jalankan," ujar Satryo.

Ia ingin pendidikan tinggi memiliki peran terhadap target pengentasan kemiskinan. Selain itu, juga mendorong swasembada pangan. "Swasembada energi karena ini semua adalah kebutuhan hidup masyarakat," jelasnya.

Pendidikan tinggi, lanjutnya, harus mendukung subsidi tepat sasaran, sehingga kemiskinan dapat diatasi. "Mendorong

hilirisasi komoditas sumberdaya alam, kita harus memanfaatkan ini, kami berupaya terus hilirisasi terjadi dengan baik," ujar Satryo.

Mengenai program prioritas, Mendiknas Satryo Soemantri Brojonegoro menetapkan sejumlah program yang nantinya menjadi bagian dari kontribusi Kemendiknas dalam pembangunan ekonomi nasional. "Akses pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdampak," katanya.

Ia ingin menjadikan pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan talenta sains dan teknologi. Termasuk, memperkuat ekosistem penelitian dan pengembangan, penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah penelitian dan pengembangan.

Selain itu, pihaknya ingin turut serta dalam penyelesaian permasalahan sosial, termasuk ekonomi. Satryo ingin pendidikan tinggi mampu memberikan dampak lebih baik kepada masyarakat. Kemudian, memiliki peran terhadap target pengentasan kemiskinan dan mendorong swasembada pangan. (Ati-d)

Kemdiknas Evaluasi Program Kampus Merdeka

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam upaya tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiknas) Fauzan saat ditemui di Jakarta, Jumat (3/1), menyebutkan, kini tengah menelaah program tersebut untuk kemudian menentukan program yang akan dilanjutkan dan yang akan distop.

"Pak Menteri menyampaikan program Merdeka Belajar (Kampus Merdeka) itu akan dievaluasi, mana yang baik akan dilanjutkan, yang kira-kira kurang efektif akan dihentikan," katanya.

Hingga kini, Fauzan menyatakan belum terdapat kesimpulan yang menentukan masa depan dari program yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu. Seperti diketahui, MB-

kegiatan di luar perguruan tinggi selama dua semester. Dalam program ini, perguruan tinggi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai kebutuhan dan minat mahasiswanya.

Terdapat sejumlah sub-program dalam MBKM, di antaranya seperti Magang Bersertifikat, Studi Inde-

penden, Kampus Mengajar, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Wirausaha Merdeka.

Hingga 2024, tercatat lebih dari 400.000 mahasiswa dan lebih dari 30.000 praktisi telah mengambil bagian dan menerima manfaat dari program MBKM. (Ant-d)



Wamendiknas Fauzan (kiri) dan Stella Christie (kanan) usai kegiatan Taklimat Media di Kantor Kemendiknas, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

SELAMA RAMADAN BERLANGSUNG

Di Pendidikan Tinggi Tak Ada Wacana Libur

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiknas) Fauzan menyatakan, tak ada wacana untuk meliburkan kegiatan akademik di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia selama Ramadan. "Nggak lah, kami nggak punya wacana itu," kata Fauzan di Jakarta, Jumat (3/1).

Diketahui, wacana untuk meliburkan kegiatan pendidikan selama Ramadan kini tengah enge-

muka dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat pada saat ini, sebab kebijakan libur di bulan suci umat muslim itu juga pernah dilaksanakan di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Adapun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, terdapat sebanyak 16

hari libur nasional serta tujuh cuti bersama. Terkait hal itu, dicantumkan Idul Fitri 1446 H tanggal 31 Maret-1 April.

Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya mengatakan, belum ada pembahasan mengenai libur sekolah selama bulan puasa, dan hal tersebut masih berupa wacana di Kementerian Agama, belum berupa keputusan. Oleh karena itu, ia pun

belum tahu apakah wacana tersebut akan dibahas di tingkat kementerian koordinatur atau langsung dibahas di bawah presiden. Adapun Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar juga sebelumnya mengungkapkan hal tersebut masih menjadi wacana, namun ia menjelaskan, kebijakan meliburkan kegiatan saat Ramadan masih berlaku di sejumlah satuan pendidikan berbasis pondok pesantren. (Ant-d)

Kuliah Tamu UMY di STITN Sibolga



Mahasiswa STITM Sibolga bersama dengan dosen tamu dari UMY.

YOGYA (KR) - Membangun masyarakat mandiri ternyata bukan sekadar menjalankan program semata, melainkan butuh proses panjang dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini terungkap dalam kuliah tamu yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah (STITM) Sibolga Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Seluruh mahasiswa STITM berkesem-

patan mendalami konsep dan teknik fasilitas pemberdayaan masyarakat langsung dari pakar pemberdayaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus dosen Agribisnis dan Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa UMY, Dr Aris Slamet Widodo.

"Pemberdayaan bukan sekadar even sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan pen-

dampingan intensif. Esensi pemberdayaan terletak pada transformasi perilaku yang bermuara pada terbentuknya kemandirian masyarakat," kata Dr Aris Slamet Widodo, baru-baru ini.

Menurut Aris, potensi pesisir dan maritim yang melimpah di Sibolga perlu pendampingan berkelanjutan agar bisa optimal menopang kesejahteraan masyarakat. Mengingat di Sibolga tidak cukup hanya memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan atau pelatihan pengolahan ikan kepada ibu-ibu.

"Bayangkan jika nelayan Sibolga tidak hanya menjual ikan segar, tapi bisa mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Atau bagaimana kelompok ibu-ibu pesisir bisa mengembangkan olahan seafood khas Sibolga," paparnya. (Ria-d)

EKONOMI

DI DIY TUMBUH POSITIF Realisasi Belanja dan Pendapatan Negara

SLEMAN (KR) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIY baik di sektor belanja maupun pendapatan negara tumbuh positif hingga periode 30 November 2024. Hal tersebut menunjukkan peran APBN yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga roda ekonomi regional.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti mengatakan, kinerja Belanja Negara di DIY mencatatkan pertumbuhan positif 7,31% yoy atau sebesar Rp21,38 triliun hingga 30 November 2024. Ada 2 komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 7,67% yoy dengan realisasi 78,95% pagu dan Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 6,91% dengan realisasi 96,79%.

"Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp 4,63 triliun, Belanja Barang Rp 4,61 triliun, Belanja Modal Rp 1,86 triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp 18 miliar," kata Juli di kantornya, Kamis (2/1).

Kinerja positif terutama dipengaruhi pertumbuhan Belanja Barang sebesar 16,93% (yoy) dengan realisasi terbesar pada program Dukungan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp936,82 miliar. Sedangkan, realisasi Belanja Modal turun 16,94% (yoy) dengan realisasi terbesar pada kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampungan Air lainnya sebesar Rp 708,37 miliar.

Juli Kestijanti menyampaikan, pelambatan Belanja Modal antara lain diakibatkan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) yang diperkirakan tidak terserap optimal sampai dengan akhir tahun karena terdapat rencana pembanguan yang belum tercantum dalam masterplan K/L. Selanjutnya, ada pekerjaan konstruksi gedung kuliah yang diperpanjang menggunakan sistem multi years contract (MYC) sampai 2025.

"Sementara itu, kinerja Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 10,7% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp 8,87 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pada penerimaan Perpajakan sebesar 11% dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 9,7%," ucap Juli. Realisasi penerimaan perpajakan sampai

akhir bulan November 2024 mencapai Rp 6,38 triliun atau naik Rp 633,91 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 5,74 triliun.

Penerimaan perpajakan didominasi pajak penghasilan yang berkontribusi sebesar 54,23% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp 3,46 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai yang berkontribusi 33,05% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp 2,11 triliun serta penerimaan Cukai mencapai Rp 721,55 miliar. Sementara itu, komponen pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar 0,10% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kinerja positif turut ditunjukkan PNBPN yang pada bulan November 2024 naik 9,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Realisasi PNBPN mencapai Rp2,49 triliun yang mencapai 116,16% dari target. Angka tersebut disumbangkan oleh PNBPN Lainnya sebesar Rp 569,82 miliar dan pendapatan BLU Rp1,92 triliun. PNBPN Lainnya tumbuh 6,38% dan mencapai 197,31% dari target APBN.

"Pertumbuhan pada PNBPN Lainnya ditopang oleh peningkatan yang konsisten pada Pendapatan Biaya Pendidikan, Penerbitan STNK, dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Lalu, Pendapatan BLU tumbuh 10,76% dari periode yang sama di tahun 2023 dan mencapai 103,52% dari target APBN. Kenaikan signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang masing-masing tumbuh 11,06% dan 5,96% dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023," jelas Juli.

Ia menyebut secara keseluruhan kinerja APBN Regional DIY pada akhir November 2024 menunjukkan pertumbuhan positif baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.

"APBN terus menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat serta untuk mewujudkan program-program prioritas nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming," kata Juli. (Ira-d)

Kadin Mendorong Diorama Program MBG

JAKARTA (KR) - Tahun 2025 menjadi tahun pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu dalam acara 'Kadin: Global and Domestic Economics Outlook 2025' program itu menjadi salah satu pembahasan yang banyak diulang. Karena program MBG merupakan penguatan *human capital* yang menjadi akselerator dalam Strategi Transformasi Bangsa yang digagas Presiden Prabowo.

"Sebaiknya, program ini dilakukan dengan governansi yang baik dan transparan, sehingga tak ada celah peluang terjadinya korupsi. Pelibatan unsur lokal itu menjadi penting dalam program tersebut.

Apakah produksi pangan sudah berimbang dengan peningkatan permintaan akibat program itu," kata Wakil Ketua Umum (WКУ) Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani dalam keterangan persnya yang diterima KR, Jumat (3/1). Kegiatan yang mengangkat tema 'Kadin: Global & Domestic Economic



Aviliani bersama Pengurus Kadin Indonesia.

Outlook 2025' juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie. Menurut Aviliani, berdasarkan perhitungan Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Program MBG yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 dinilai berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,3-0,5 persen terhadap PDB dan mendorong perputaran uang di desa sebesar Rp 6-8 miliar setiap tahunnya. Jumlah itu melebihi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah.

Untuk itu Kadin mendorong implementasi pro-

gram MBG agar terwujud sumberdaya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan produktif.

"Kadin menilai dalam mendukung program MBG penyaluran pendanaan dapat dilakukan melalui koperasi dan pemerintah dapat membentuk *central purchasing* yang terintegrasi dengan storage di kawasan pertanian. Semua itu penting agar hasil panen petani dapat langsung terserap dan menghilangkan potensi terjadinya *food loss* akibat kurang memadai-

nya infrastruktur storage di petani lokal," paparnya. Sementara itu, Kakompas Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Prof Hermanto Siregar memaparkan, diperlukan upaya transformatif untuk mendorong *food technology* di Indonesia. Program MBG dinilai menjadi awal yang baik untuk memunculkan ide RnD baru mengenai penerapan strategi *food technology* untuk menjadikan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang konvensional menjadi pabrikasi. (Ria-d)

Lima Jurus BNI Hadapi Tantangan 2025

JAKARTA (KR) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI optimistis dalam membuka lembaran baru 2025 dengan menjaga pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan transaksi dana murah menjadi salah satu fokus utama tahun ini.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tantangan likuiditas perbankan perlu diantisipasi dengan strategi bisnis yang terukur guna menjaga pertumbuhan kinerja BNI tahun ini. "Tantangan di depan dari ketidakpastian global menyebabkan

tekanan nilai tukar rupiah dan likuiditas. BNI telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan dana murah lewat ekspansi digital perbankan," kata Royke dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (2/1).

Royke menyampaikan, ada lima fokus utama yang harus BNI optimalkan tahun ini di antaranya Transformasi Kantor Cabang, Transformasi Human Capital atau meningkatkan produktivitas pegawai, pertumbuhan DPK khususnya tabungan dari transaksi, mem-

perkuat ekosistem digital dalam meningkatkan CASA dan fee based income serta melanjutkan perbaikan kualitas kredit. "Diperlukan kolaborasi yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut," tutur Royke.

BNI terus berupaya meningkatkan kinerja bank secara berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Royke mengatakan, rencana strategis perseroan 2025 akan selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan aspirasi pemegang saham diantaranya peningkatan kinerja melalui upaya strategis cus-

tomer centric khususnya segmen Korporasi dan Konsumer, peningkatan jaringan internasional secara selektif serta meningkatkan *green financing*.

Selain itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui digitalisasi proses bisnis termasuk penggunaan mobile banking juga menjadi fokus utama tahun ini.

"Melalui wondr by BNI dan BNI direct serta seluruh ekosistem digital BNI, diharapkan akan mendorong pertumbuhan CASA dan transaksi, sehingga dapat menopang kinerja ke depan," ujarnya. (Lmg-d)